



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I. PENDAHULUAN;
  - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
  - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
  - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1448

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

#### **1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan akhir yang disempurnakan menjadi dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah dan dokumen Renja yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) RKPD. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Mengingat peran dan fungsi Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam, maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif oleh seluruh aparatur Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan masyarakat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat dan berkesinambungan.

### 1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

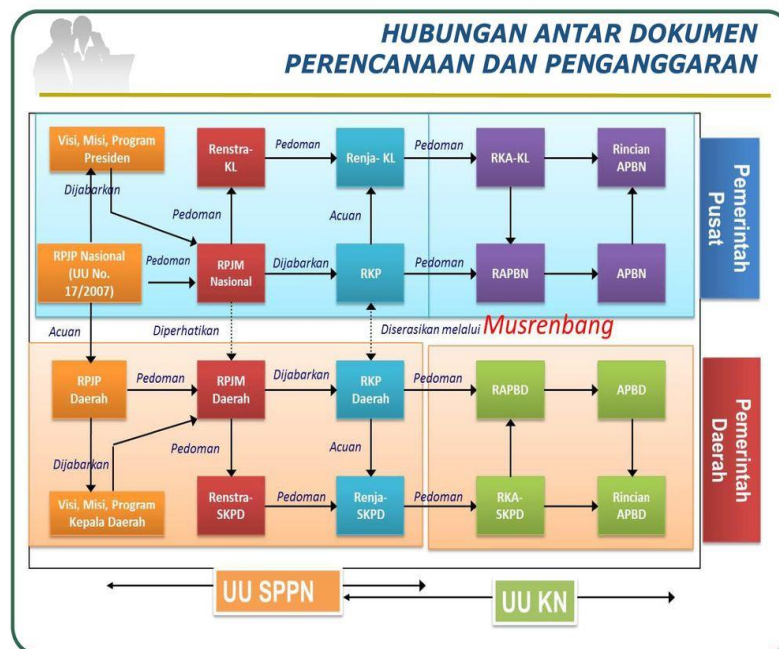


Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

### 1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun), baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (termasuk kementerian/lembaga=KL) maupun pemerintah daerah (termasuk satuan kerja perangkat daerah = SKPD). Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Daerah) untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka pendek. Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 1.2. Hubungan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  13. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
  14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
  15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
  16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021))
  17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
  18. Peraturan Walikota Batam Nomor ... Tahun 2023 Tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026.
  19. Peraturan Walikota Batam Nomor ... Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 20

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:

1. sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025
2. sebagai pedoman monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program/kegiatan
3. sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tema, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2024

3.3. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.4. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

Jumlah pagu anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2023 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp.42.405.714.902,00 dengan realisasi belanja sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp.39.406.139.828,00 atau sebesar 92,93%.

Dalam penganggaran tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 8 Program dan 13 kegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 dan Capaian Rencana dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

**TABEL II.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM S/D DESEMBER 2023**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Tabel : T.C - 29

| KODE         | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcomes)/<br>Kegiatan (output              | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah | Realisasi<br>Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>dengan<br>tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                         |                             | Target<br>program dan<br>kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun berjalan |                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                                                                           |                                                                              |                                                                            |                                                                                                         | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2023                     | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                                   | Realisasi Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2024)   | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 1.06.01      | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Persentase<br>terpenuhinya<br>penunjang urusan<br>pemerintahan<br>daerah     | 100 %                                                                      | 100 %                                                                                                   | 100 %                                                                    | 100 %                                                   | 100 %                       | 100 %                                                                             | 100 %                                                                                | 100 %                                              |
| 1.06.01.2.01 | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Jumlah dokumen<br>perencanaan yang<br>disusun tepat waktu                    | 2 Dokumen                                                                  | 2 Dokumen                                                                                               | 2 Dokumen                                                                | 2 Dokumen                                               | 100 %                       | 2 Dokumen                                                                         | 2 Dokumen                                                                            | 100 %                                              |
| 1.06.01.2.02 | Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                              | Persentase<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah yang<br>terpenuhi | 100 Persen                                                                 | 100 Persen                                                                                              | 100 Persen                                                               | 100 Persen                                              | 100 %                       | 100 Persen                                                                        | 100 Persen                                                                           | 100 %                                              |

|              |                                                                       |                                                                                                  |            |            |            |            |       |            |            |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| 1.06.01.2.03 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                                                                                                  |            |            |            |            | 100 % |            |            | 100 % |
| 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                         | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | 100 Persen | 100 Persen | 100 % |
| 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana    | 1 Unit     | 1 Unit     | 1 Unit     | 1 Unit     | 100 % | 1 Unit     | 1 Unit     | 100 % |
| 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | 100 Persen | 100 Persen | 100 % |
| 1.06.012.09  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | 100 Persen | 100 Persen | 100 % |
| 1.06.02      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                           | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif                                        | 100 %      | 100 %      | 100 %      | 100 %      | 100 % | 100 %      | 100 %      | 100 % |

|              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                    |                                    |                                  |       |                                    |                                  |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Persentase PSKS yang difasilitasi                                                                                                                                                                                                                  | 100 Persen                         | 100 Persen                         | 100 Persen                         | 100 Persen                       | 100 % | 100 Persen                         | 100 Persen                       | 100 % |
| 1.06.04      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        | 1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;<br>2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi                                                                                                 | 1. 90.18% 2. 90.18 %               | 1. 90.18% 2. 90.18 %               | 1. 90.18% 2. 90.18 %               | 1. 90.18% 2. 90.18 %             | 100 % | 1. 90.18% 2. 90.18 %               | 1. 90.18% 2. 90.18 %             | 100 % |
| 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi;<br>2. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi;<br>3. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi<br>4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi | 75 %<br>85,7 %<br>10,9 %<br>92,6 % | 75 %<br>85,7 %<br>10,9 %<br>92,6 % | 75 %<br>85,7 %<br>10,9 %<br>92,6 % | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | 100 % | 75 %<br>85,7 %<br>10,9 %<br>92,6 % | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | 100 % |

|              |                                                                            |                                                                                                               |              |              |                 |              |       |              |              |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|
| 1.06.05      | PROGRAM<br>PERLINDUNGAN DAN<br>JAMINAN SOSIAL                              | Persentase DTKS<br>yang memperoleh<br>perlindungan dan<br>jaminan sosial (PKH,<br>BPNT)                       | 79.01 %      | 79.01 %      | 79.01 %         | 79.01 %      | 100 % | 79.01 %      | 79.01 %      | 100 % |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data<br>Fakir Miskin Cakupan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota       | Persentase DTKS<br>yang divalidasi dan<br>Jumlah mahasiswa<br>yang di bantu                                   | 100 Persen   | 100 Persen   | 100 Persen      | 100 Persen   | 100 % | 100 Persen   | 100 Persen   | 100 % |
| 1.06.06      | PROGRAM<br>PENANGANAN<br>BENCANA                                           | Persentase korban<br>bencana yang<br>ditangani pada saat<br>dan setelah tanggap<br>darurat bencana            | 100 %        | 100 %        | 100 %           | 100 %        | 100 % | 100 %        | 100 %        | 100 % |
| 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial<br>Korban Bencana Alam<br>dan Sosial<br>Kabupaten/Kota | Persentase korban<br>bencana dari<br>kelompok rentan<br>yang dilindungi dan<br>diberikan<br>penjaminan sosial | 100 Persen   | 100 Persen   | 100 Persen      | 100 Persen   | 100 % | 100 Persen   | 100 Persen   | 100 % |
| 1.06.07      | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>TAMAN MAKAM<br>PAHLAWAN                          | Persentase<br>pemeliharaan dan<br>pengamanan TMP<br>yang terlaksana                                           | 89.66 %      | 89.66 %      | 89.66 %         | 89.66 %      | 100 % | 89.66 %      | 89.66 %      | 100 % |
| 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman<br>Makam Pahlawan<br>Nasional<br>Kabupaten/Kota         | Persentase sarana<br>dan prasarana TMP<br>yang direhab dan<br>dipelihara                                      | 89.66 Persen | 89.66 Persen | 89.66<br>Persen | 89.66 Persen | 100 % | 89.66 Persen | 89.66 Persen | 100 % |

|              |                                                                                     |                                                               |              |              |              |              |       |              |              |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|
| 2.13.04      | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              | Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya | 93.75 %      | 93.75 %      | 93.75 %      | 93.75 %      | 100 % | 93.75 %      | 93.75 %      | 100 % |
| 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa             | Jumlah kelurahan yang berprestasi                             | 12 Kelurahan | 12 Kelurahan | 12 Kelurahan | 12 Kelurahan | 100 % | 12 Kelurahan | 12 Kelurahan | 100 % |
| 2.13.05      | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif        | 98.44 %      | 98.44 %      | 98.44 %      | 98.44 %      | 100 % | 98.44 %      | 98.44 %      | 100 % |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |            |            |            |            |       |            |            |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | 100 Persen | 100 Persen | 100 % |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |             |             |             |             |       |             |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 686 Lembaga | 686 Lembaga | 686 Lembaga | 686 Lembaga | 100 % | 686 Lembaga | 686 Lembaga | 100 % |
| Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                              | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100 % | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100 % |

Berdasarkan tabel evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023 dan capaian Renstra, program dan kegiatan yang disajikan per Desember 2023, yang disajikan semuanya mencapai 100%. Hal ini mengingat beberapa pekerjaan dapat dianggarkan sesuai target yang sudah ditetapkan.

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, serta untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang disajikan pada Tabel 2.2, sebagai berikut:

**TABEL II.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**TAHUN 2023**

Tabel T.C-30

| NO | INDIKATOR                                                                 | SPM/SNI | IKK                                                                                                                                                                             | TARGET RENSTRA |      |      |      | REALISASI<br>CAPAIAN |      | PROYEKSI |      | CATATAN<br>ANALISIS |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|----------------------|------|----------|------|---------------------|
|    |                                                                           |         |                                                                                                                                                                                 | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                 | 2023 | 2024     | 2025 |                     |
| 1  | Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan                               | SPM     | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | 95%            | 95%  | 96%  | 96%  | 94%                  | 95%  | 95%      | 96%  |                     |
| 2  | Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial                    | SPM     | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                                 | 90%            | 90%  | 90%  | 90%  | 89%                  | 90%  | 90%      | 90%  |                     |
| 3  | Persentase kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik |         |                                                                                                                                                                                 | 75%            | 94%  | 94%  | 100% | 100%                 | 75%  | 94%      | 94%  |                     |
| 4  | Persentase kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif             |         |                                                                                                                                                                                 | 98%            | 98%  | 99%  | 100% | 100%                 | 98%  | 98%      | 99%  |                     |

**TABEL II.3**  
**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA**  
**BATAM**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                | INDIKATOR KINERJA                                                         | TARGET | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 1  | Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS                   | Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan                               | 95%    | 93%       | 98%             |
| 2  | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat          | Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial                    | 90%    | 89%       | 98%             |
| 3  | Meningkatnya kelurahan dengan adminitrasi pemerintahan yang baik | Persentase kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik | 100%   | 100%      | 100%            |
| 4  | Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif     | Persentase kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif             | 100%   | 100%      | 100%            |

Berdasarkan tabel II.3 terkait pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang merupakan menjadi Indikator Kinerja Utama yang disajikan tidak semuanya mencapai 100%. Hal ini mengingat beberapa pekerjaan tidak dapat dianggarkan sesuai target yang sudah ditetapkan, sebagaimana dapat dijelaskan pada uraian berikut ini:

1. Indikator Kinerja Sasaran *Meningkatnya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* hal ini di ukur dari Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah x 100%
2. Indikator Kinerja Sasaran *Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Terhadap (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) PPKS* hal ini di ukur dari Jumlah hasil pada program Pemberdayaan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial (190) / jumlah program Pemberdayaan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial (2) x 100%
3. Indikator Kinerja Sasaran *Meningkatnya Perlindungan dan jaminan Sosial Masyarakat* hal ini diukur dengan Jumlah hasil pada Program Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan

- Bencana (179) / jumlah Program Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana (2) x 100%
4. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kelurahan dengan adminitrasi pemerintahan yang baik hal ini diukur dengan Jumlah kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik sebanyak (48) / jumlah kelurahan yang ada sebanyak (64) x 100%
  5. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif diukur dengan Jumlah kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif (675) / Jumlah Kelembagaan masyarakat yang ada (681) x 100%

### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Permasalahan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS yang menjadi sasaran penyelenggaraan urusan sosial saat ini terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Beberapa persoalan pokok yang menjadi fokus atau perhatian bersama, yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia. selain terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam melakukan kegiatan dan penanganan terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya adalah PSKS dan pekerja-pekerja sosial. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dituntut untuk bisa meningkatkan kecakapan dan kompetensi sumber daya manusianya.

2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki, Banyaknya program kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan pencapaian target 100% diperlukan dana yang tidak sedikit. dana yang bersumber dari dana APBD Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau, APBN masih terbatas untuk melakukan Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial secara menyeluruh.
3. Kesulitan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermobilitas sangat tinggi seperti Tuna Sosial sehingga data selalu berubah. Disisi lain partisipasi bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan juga masih kurang dalam Pembangunan Bidang Sosial.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terus melakukan perbaikan, dan pengembangan secara kelembagaan baik SDM, Organisasi dan tatalaksana yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Dinsospm Kota Batam dapat mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos kerja yang baik, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan Bidang Sosial nasional secara umum dan Kesejahteraan masyarakat Kota Batam khususnya.

Beberapa factor penyebab belum optimalnya pencapaian fungsi tersebut diatas sehingga menjadi isu strategis antara lain karena :

- a. Masih terbatasnya dan minimnya sumber daya manusia Sosial yang bersifat pegawai tetap yang ada saat ini terutama yang berlatar belakang Pekerja Sosial;
- b. Masih kurang optimalnya pemberian pelayanan secara prima karena pemahaman dan rasa pengabdian yang kurang;
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Sosial yang sesuai tuntutan teknologi terkini;
- d. Belum tercapainya standar pelayanan sesuai yang telah ditetapkan;
- e. Kurangnya kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur;

- f. Belum memadai system manajemen dan pengendalian mutu;
- g. Masih terbatasnya sarana prasarana fisik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Belum memadainya pengelolaan asset
- i. Belum efektifnya system pelayanan penunjang;
- j. Belum terpenuhinya SDM yang berkualitas;

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada Tabel

II.4 berikut ini :

**TABEL II.4**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD                                              |            |                                                                  |                |                         | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                         |            |                                                                  |                |                         | CATATAN PENTING |
|----|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
|    | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                    | LOKASI     | INDIKATOR KINERJA                                                | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.000) | PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN                                   | LOKASI     | INDIKATOR KINERJA                                                | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.000) |                 |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Kota Batam | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah     | 100 %          | 13.946.010.968          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Kota Batam | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah     | 100 %          | 16.025.258.860          |                 |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu              | 2 Dokumen      | 76.915.190              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu              | 2 Dokumen      | 69.393.000              |                 |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      | 1 Dokumen      | 76.915.190              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      | 2 Dokumen      | 69.393.000              |                 |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |            | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen     | 11.582.553.328          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |            | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen     | 11.652.987.070          |                 |

|  |                                                                  |  |                                                                                    |                |                |                                                                  |  |                                                                                    |                |                |  |
|--|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 69 Orang/bulan | 11.582.553.328 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 63 Orang/bulan | 11.652.987.070 |  |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |  |                                                                                    |                | 107.381.364    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |  |                                                                                    |                | 94.200.000     |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | 3 Paket        | 107.381.364    | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | 60 Paket       | 94.200.000     |  |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |  | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | 100 Persen     | 428.695.931    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |  | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | 100 Persen     | 310.285.000    |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket        | 12.895.396     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket        | 4.005.000      |  |

|  |                                                          |  |                                                                              |           |            |                                                          |  |                                                                              |           |            |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--|
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 3 Paket   | 59.170.436 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 3 Paket   | 46.000.000 |  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 3 Paket   | 39.171.387 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 3 Paket   | 60.000.000 |  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 2 Paket   | 23.331.363 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 2 Paket   | 45.004.000 |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1.999.355  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1.800.000  |  |

|  |                                                                  |  |                                                                                             |            |             |                                                                  |  |                                                                                             |            |               |  |
|--|------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--|
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 36 Laporan | 292.127.994 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 12 Laporan | 153.476.000   |  |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana | 1 Unit     | 859.045.358 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana | 1 Unit     | 1.370.200.797 |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                       | 1 Unit     | 536.906.820 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                       | 1 Unit     | 453.255.000   |  |
|  | Pengadaan Mebel                                                  |  |                                                                                             | 3 Unit     | 22.838.188  | Pengadaan Mebel                                                  |  |                                                                                             | 44 Unit    | 164.087.000   |  |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | 10 Unit    | 91.920.350  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                     | 44 Unit    | 138.090.000   |  |

|  |                                                                              |  |                                                                                        |            |             |                                                                              |  |                                                                                        |            |             |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|
|  |                                                                              |  | yang<br>Disediakan                                                                     |            |             |                                                                              |  |                                                                                        |            |             |  |
|  | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya |  |                                                                                        | 1 Unit     | 207.380.000 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya |  |                                                                                        | 3 Unit     | 614.768.797 |  |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen | 433.444.189 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 Persen | 385.220.400 |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 433.444.189 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 385.220.400 |  |

|  |                                                                                                                     |  |                                                                                                        |            |             |                                                                                                                     |  |                                                                                                        |            |               |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--|
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana       | 100 Persen | 457.975.608 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana       | 100 Persen | 2.142.972.593 |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit     | 89.926.549  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit     | 44.240.000    |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan              | 10 Unit    | 177.501.634 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit     | 201.839.000   |  |

|   |                                                                                    |            |                                                                                                |         |               |                                                                                    |            |                                                                                                |         |               |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--|
|   |                                                                                    |            | Perizinannya                                                                                   |         |               |                                                                                    |            |                                                                                                |         |               |  |
|   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           |            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                             | 50 Unit | 84.472.752    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           |            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                             | 55 Unit | 128.500.000   |  |
|   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit  | 106.074.673   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit  | 1.768.393.593 |  |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                        | Kota Batam | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif                                      | 100 %   | 2.276.647.711 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                        | Kota Batam | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif                                      | 100 %   | 2.088.134.000 |  |

|  |                                                                                               |  |                                                                                                                                 |            |               |                                                                                               |  |                                                                                                                                 |            |               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--|
|  | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                        |  | Persentase PSKS yang difasilitasi                                                                                               | 100 Persen | 2.276.647.711 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                        |  | Persentase PSKS yang difasilitasi                                                                                               | 100 Persen | 2.088.134.000 |  |
|  | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota             |  | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 98 Orang   | 1.479.985.258 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota             |  | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 98 Orang   | 1.500.000.000 |  |
|  | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota |  | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Orang   | 173.410.000   | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota |  | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Orang   | 173.410.000   |  |

|  |                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |               |             |                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |               |             |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|
|  | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |  | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | 10 Lembaga    | 530.431.749 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |  | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | 10 Lembaga    | 300.000.000 |  |
|  | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)    |  | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | 36 Sertifikat | 92.820.704  | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)    |  | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | 36 Sertifikat | 114.724.000 |  |

|   |                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                    |                                    |               |                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |               |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--|
| 3 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        | Kota Batam | 1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;<br>2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi | 1. 90.18%<br>2. 90.18 %            | 1.982.527.941 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        | Kota Batam | 1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;<br>2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi                                                                                                 | 1. 90.18%<br>2. 90.18 %            | 3.035.342.488 |  |
|   | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |            | 1. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi;<br>2. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi;<br>3. Persentase penyandang               | 75 %<br>85,7 %<br>10,9 %<br>92,6 % | 1.982.527.941 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |            | 1. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi;<br>2. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi;<br>3. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi<br>4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi | 75 %<br>85,7 %<br>10,9 %<br>92,6 % | 3.035.342.488 |  |

|  |                       |  |                                                                                                                            |           |             |                       |  |                                                                                                                            |           |             |  |
|--|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--|
|  |                       |  | disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi<br>4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi              |           |             |                       |  |                                                                                                                            |           |             |  |
|  | Penyediaan Permakanan |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 350 Orang | 345.494.541 | Penyediaan Permakanan |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 360 Orang | 352.665.000 |  |

|  |                                          |  |                                                                                            |           |             |  |                                          |  |                                                                                                           |          |             |  |
|--|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--|
|  | Penyediaan Alat Bantu                    |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang  | 118.119.500 |  | Penyediaan Alat Bantu                    |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 Orang | 91.100.000  |  |
|  | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota     | 100 Orang | 197.050.606 |  | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 40 Orang | 539.148.480 |  |

|  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |           |             |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                              |           |             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--|
|  | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 700 Orang | 784.989.340 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |  | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 550 Orang | 644.287.008 |  |
|  | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                | 35 Orang  | 146.504.410 | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                | 15 Orang  | 74.867.000  |  |

|   |                                                             |            |                                                                             |             |               |                                                             |            |                                                                             |                   |                      |  |
|---|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--|
|   | Pemberian Layanan Rujukan                                   |            | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota          | 89 Orang    | 390.369.544   | Pemberian Layanan Rujukan                                   |            | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota          | 80 Orang          | 1.333.275.000        |  |
| 4 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     | Kota Batam | Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT) | 79.01 %     | 2.269.425.962 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     | Kota Batam | Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT) | <b>79.01 %</b>    | <b>1.118.000.000</b> |  |
|   | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |            | Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu          | 100 Persen  | 2.269.425.962 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |            | Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu          | <b>100 Persen</b> | <b>1.118.000.000</b> |  |
|   | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        |            | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata               | 60108 Orang | 2.245.900.156 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        |            | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata               | 31320 Orang       | 927.000.000          |  |

|   |                                                                   |            |                                                                                                                         |            |             |                                                                   |            |                                                                                                                         |                   |                    |  |
|---|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
|   | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                  |            | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang   | 23.525.806  | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                  |            | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Keluarga       | 191.000.000        |  |
| 5 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                        | Kota Batam | Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana                                  | 100 %      | 398.554.332 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                        | Kota Batam | Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana                                  | <b>100 %</b>      | <b>439.854.000</b> |  |
|   | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |            | Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan                                            | 100 Persen | 398.554.332 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |            | Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial                          | <b>100 Persen</b> | <b>439.854.000</b> |  |

|   |                                                           |            |                                                                                                                       |              |             |                                                           |            |                                                                                                                       |                     |                    |  |
|---|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--|
|   |                                                           |            | penjaminan sosial                                                                                                     |              |             |                                                           |            |                                                                                                                       |                     |                    |  |
|   | Penyediaan Makanan                                        |            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1200 Orang   | 398.554.332 | Penyediaan Makanan                                        |            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 500 Orang           | 439.854.000        |  |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                  | Kota Batam | Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana                                                            | 89.66 %      | 279.585.182 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                  | Kota Batam | Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana                                                            | <b>89.66 %</b>      | <b>230.498.000</b> |  |
|   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |            | Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara                                                       | 89.66 Persen | 279.585.182 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |            | Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara                                                       | <b>89.66 Persen</b> | <b>230.498.000</b> |  |

|   |                                                                         |            |                                                                                      |              |             |                                                                         |            |                                                                                      |                     |                    |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--|
|   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota               |            | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 21 Makam     | 200.677.302 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota               |            | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 45 Makam            | 157.516.000        |  |
|   | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                 |            | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota         | 12 Laporan   | 78.907.880  | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                 |            | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota         | 12 Laporan          | 72.982.000         |  |
| 7 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                  | Kota Batam | Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya                        | 93.75 %      | 232.129.147 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                  | Kota Batam | Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya                        | <b>93.75 %</b>      | <b>140.000.000</b> |  |
|   | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |            | Jumlah kelurahan yang berprestasi                                                    | 12 Kelurahan | 232.129.147 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |            | Jumlah kelurahan yang berprestasi                                                    | <b>12 Kelurahan</b> | <b>140.000.000</b> |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                |                   |                       |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
|   | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                 |            | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 3 Dokumen  | 232.129.147    | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                             |            | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 3 Dokumen         | 140.000.000           |  |
| 8 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                  | Kota Batam | Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif                         | 98.44 %    | 18.772.078.216 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                              | Kota Batam | Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif                         | <b>98.44 %</b>    | <b>21.841.833.000</b> |  |
|   | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama |            | Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi                            | 100 Persen | 18.772.078.216 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |            | Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi                            | <b>100 Persen</b> | <b>21.841.833.000</b> |  |

|  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |           |             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 3 Dokumen | 322.144.092 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |             |                |                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                    |             |                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--|
|  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 686 Lembaga | 17.191.246.664 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 711 Lembaga | 20.978.923.000 |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                             |           |             |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--|
|  | Fasilitasi<br>Penyediaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelembagaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan<br>(RT, RW, PKK,<br>Posyandu, LPM,<br>dan Karang<br>Taruna), Lembaga<br>Adat<br>Desa/Kelurahan<br>dan Masyarakat<br>Hukum Adat |  | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelembagaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan<br>(RT, RW, PKK,<br>Posyandu, LPM, dan<br>Karang<br>Taruna), Lembaga<br>Adat<br>Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat<br>Hukum<br>Adat | 540 Unit  | 322.144.092 | Fasilitasi Penyediaan<br>Sarana dan Prasarana<br>Kelembagaan Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan (RT,<br>RW, PKK, Posyandu,<br>LPM, dan Karang<br>Taruna), Lembaga Adat<br>Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat |  | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelembagaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan<br>(RT, RW, PKK,<br>Posyandu, LPM,<br>dan Karang<br>Taruna),<br>Lembaga Adat<br>Desa/Kelurahan<br>dan Masyarakat<br>Hukum Adat |           |             |  |
|  | Fasilitasi<br>Pemerintah Desa<br>dalam<br>Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat<br>Guna                                                                                                                                                                 |  | Jumlah<br>Laporan<br>Hasil<br>Fasilitasi<br>Pemerintah<br>Desa dalam<br>Pemanfaatan<br>Teknologi<br>Tepat Guna                                                                                                                    | 3 Laporan | 204.202.466 | Fasilitasi Pemerintah<br>Desa dalam<br>Pemanfaatan Teknologi<br>Tepat Guna                                                                                                                                                        |  | Jumlah Laporan<br>Hasil Fasilitasi<br>Pemerintah Desa<br>dalam<br>Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat<br>Guna                                                                                                                    | 3 Laporan | 294.507.500 |  |

|   |                                                                                                               |            |                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                               |            |                                                                                                                                    |           |                    |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--|
|   | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                              |            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                              | 12 Laporan | 214.762.728 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                              |            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                              | 2 Laporan | 568.402.500        |  |
|   | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Dokumen  | 517.578.174 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |           |                    |  |
| 9 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                   | Kota Batam | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                       |            | 183.640.765 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                   | Kota Batam | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                       |           | <b>150.000.000</b> |  |

|    |                                                                                    |            |                                                                                                    |        |             |                                                                                    |            |                                                                                                                                                    |        |             |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--|
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |            | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana   |        | 183.640.765 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |            | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana                                                   |        | 150.000.000 |  |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi     | 1 Unit | 183.640.765 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                     | 1 Unit | 150.000.000 |  |
| 10 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                        | Kota Batam | 1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;<br>2. Persentase penyandang |        | 834.785.094 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                        | Kota Batam | 1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;<br>2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi |        | 636.955.000 |  |

|  |                                                                                                                                                    |  |                                                                                        |           |             |                                                                                                                                                    |  |                                                                                        |           |             |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--|
|  |                                                                                                                                                    |  | disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi                                        |           |             |                                                                                                                                                    |  |                                                                                        |           |             |  |
|  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |  | Persentase tuna sosial yang direhabilitasi                                             |           | 834.785.094 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |  | Persentase tuna sosial yang direhabilitasi                                             |           | 636.955.000 |  |
|  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                           |  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 500 Orang | 834.785.094 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                           |  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 550 Orang | 636.955.000 |  |

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Program dan kegiatan merupakan cara untuk mendukung arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun program dan kegiatan hampir 80% berhubungan dengan kepentingan masyarakat, usulan dari masyarakat yang ditampung dalam kegiatan berasal dari musyawah pembangunan daerah dari tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota. Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat pada Tabel II.5, yaitu :

**TABEL II.5**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

Tabel TC - 32

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN                    | LOKASI     | INDIKATOR KINERJA                                                | BESARAN/VOLUME | CATATAN |
|----|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Kota Batam | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah     | 100 %          |         |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu              | 2 Dokumen      |         |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      | 2 Dokumen      |         |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |            | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen     |         |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                | 63 Orang/bulan |         |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |            |                                                                  |                |         |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan           | 60 Paket       |         |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |            | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah         | 100 Persen     |         |

|  |                                                                              |  |                                                                                             |            |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan          | 2 Paket    |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                              | 3 Paket    |  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                          | 3 Paket    |  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                   | 2 Paket    |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                | 1 Dokumen  |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 12 Laporan |  |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             |  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana | 1 Unit     |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                       | 1 Unit     |  |
|  | Pengadaan Mebel                                                              |  |                                                                                             | 44 Unit    |  |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                     | 44 Unit    |  |
|  | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya |  |                                                                                             | 1 Unit     |  |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 Persen |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan      | 12 Laporan |  |

|   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                 |                   |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |            | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana                                | 100 Persen        |  |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                          | 1 Unit            |  |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                          | 5 Unit            |  |
|   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                              | 55 Unit           |  |
|   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  | 3 Unit            |  |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                         | Kota Batam | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif                                                                       | <b>100 %</b>      |  |
|   | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                              |            | Persentase PSKS yang difasilitasi                                                                                               | <b>100 Persen</b> |  |
|   | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                   |            | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 98 Orang          |  |
|   | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                       |            | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Orang          |  |
|   | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota          |            | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | 10 Lembaga        |  |

|   |                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|   | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)                                            |            | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                    | 36 Sertifikat                                |  |
| 3 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        | Kota Batam | 1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;<br>2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi                                                                                                 | <b>1. 90.18% 2. 90.18 %</b>                  |  |
|   | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |            | 1. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi;<br>2. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi;<br>3. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi<br>4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi | <b>75 %<br/>85,7 %<br/>10,9 %<br/>92,6 %</b> |  |
|   | Penyediaan Permakanan                                                                                                                              |            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                          | 360 Orang                                    |  |
|   | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                              |            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                          | 60 Orang                                     |  |
|   | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                           |            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                             | 40 Orang                                     |  |

|   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                              |                   |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|   | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |            | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 550 Orang         |  |
|   | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 |            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                | 15 Orang          |  |
|   | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                     |            | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                           | 80 Orang          |  |
| 4 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                                       | Kota Batam | Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)                                                                                                                  | <b>79.01 %</b>    |  |
|   | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   |            | Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu                                                                                                                           | <b>100 Persen</b> |  |
|   | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                          |            | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                                                                | 31320 Orang       |  |
|   | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                                              |            | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | 20 Keluarga       |  |
| 5 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                                                    | Kota Batam | Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana                                                                                                       | <b>100 %</b>      |  |
|   | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                                                             |            | Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial                                                                                               | <b>100 Persen</b> |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                      |                     |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|   | Penyediaan Makanan                                                                                                                                                                                                   |            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1200 Orang          |  |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                                                                                                                                             | Kota Batam | Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana                                                           | <b>89.66 %</b>      |  |
|   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                                                                                                                            |            | Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara                                                      | <b>89.66 Persen</b> |  |
|   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                                                                                                                            |            | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota                                  | 45 Makam            |  |
|   | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              |            | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                         | 12 Laporan          |  |
| 7 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                               | Kota Batam | Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya                                                        | <b>93.75 %</b>      |  |
|   | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                              |            | Jumlah kelurahan yang berprestasi                                                                                    | <b>12 Kelurahan</b> |  |
|   | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                 |            | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                       | 3 Dokumen           |  |
| 8 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                  | Kota Batam | Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif                                                                | <b>98.44 %</b>      |  |
|   | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama |            | Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi                                                                  | <b>100 Persen</b>   |  |

|  |                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                        |             |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|  | dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                        |             |  |
|  | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |  | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |             |  |
|  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                               |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                     | 711 Lembaga |  |
|  | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat          |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                   |             |  |
|  | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                            |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                 | 3 Laporan   |  |
|  | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                             |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                  | 2 Laporan   |  |

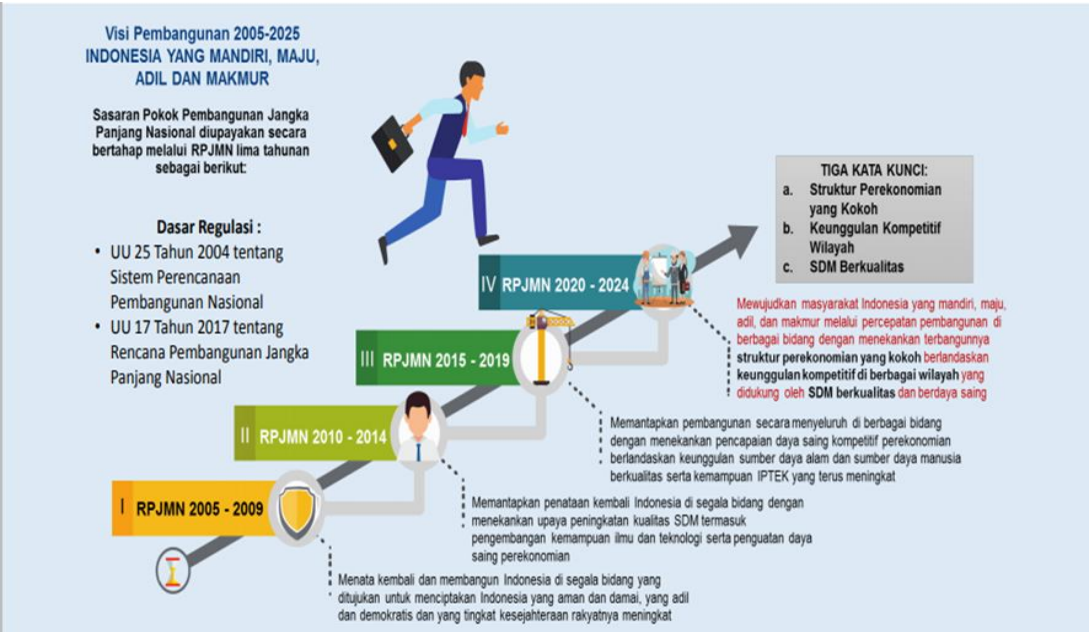
|    |                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                    |                                       |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|    | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                      |            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                 |                                       |  |
| 9  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                        | Kota Batam | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                                       | <b>100 %</b>                          |  |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              |            | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana                                                   | <b>100 %</b>                          |  |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                 |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                     | 1 Unit                                |  |
| 10 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        | Kota Batam | 1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;<br>2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi | <b>1. 90.18%</b><br><b>2. 90.18 %</b> |  |
|    | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |            | Persentase tuna sosial yang direhabilitasi                                                                                                         | 75 %<br>85,7 %<br>10,9 %<br>92,6 %    |  |
|    | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                           |            | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | 550 Orang                             |  |

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi kedalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2025 berada pada tahap jangka menengah yang ke-lima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong



Gambar 3.1. Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025**

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah disusun untuk periode 5 (lima) tahun kedepan tahun 2021-2026 berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu sebagai berikut:

#### **VISI**

TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA

#### **MISI**

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia
4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsive, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat berada dalam misi ke 3 (tiga) yaitu ***Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia***

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Dan

Pemberdayaan Masyarakat untuk Tahun 2021-2026 yang telah disusun seperti Tabel berikut ini :

**Tabel III.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TA 2025**

| NO | TUJUAN/SASARAN PD                                                                              | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PD                                               | TARGET 2025 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Meningkatkan pelayanan sosial terhadap masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial       | Persentase penurunan PPKS                                                 | 1.40%       |
| 2  | Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS                                                 | Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan                               | 96%         |
| 3  | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat                                        | Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial                    | 90%         |
| 4  | Meningkatkan pemberdayaan/kapasitas kelembagaan masyarakat dalam berpartisipasi di pembangunan | Persentase kelurahan aktif dan baik                                       | 100%        |
| 5  | Meningkatnya kelurahan dengan adminitrasi pemerintahan yang baik                               | Persentase kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik | 100%        |
| 6  | Meningkatnya kelembagaan Kemasyarakatan yang aktif                                             | Persentase kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif             | 100%        |

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026. Perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat disusun sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 90 Tahun 2019 dalam rangka mendukung pencapaian misi ke 2 (dua) dan ke 6 (enam) Kota Batam tahun 2021-2026 direncanakan berjumlah 8 (Delapan) program Perangkat Daerah, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 35 (Tiga puluh Lima) Sub Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3. Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.4. Kegiatan Administrasi Umum

1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.4 Sub Kegiatan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan

1.4.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur

- 1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.5.4 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pemberdayaan Sosial
  - 2.1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
    - 2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 2.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 2.1.3. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 3. Program Rehabilitas Sosial
  - 3.1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

3.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

3.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

3.1.3 Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

3.1.4 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

3.1.5 Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan

3.1.6 Sub Kegiatan Layanan Rujukan

3.1.7 Sub Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual (UPTD Nilam Suri)

4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

4.1 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1 Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

4.1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

5. Program Penanganan Bencana

5.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

5.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

6.1 Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

6.1.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

6.1.2 Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- 7. Program Administrasi Pemerintahan Desa
  - 7.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
    - 7.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
  
- 8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
  - 8.1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 8.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
    - 8.1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

**TABEL III.2**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

| KODE | URUSAN/BID.URUSAN PEMDA<br>DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR KEGIATAN<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                      | RENCANA TAHUN 2025    |                              |                                       |                | CATATAN<br>PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                |                                                                             | LOKASI                | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA / PAGU<br>INDIKATIF | SUMBER<br>DANA |                    | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA         | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF |
| 1    | 2                                                                              | 3                                                                           | 4                     | 5                            | 6                                     | 7              | 8                  | 9                                    | 10                                  |
|      | <b>DINAS SOSIAL DAN<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT</b>                        |                                                                             |                       |                              | <b>45.705.875.348</b>                 |                |                    |                                      | <b>42.745.760.971</b>               |
|      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>WAJIB YANG BERKAITAN<br/>DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |                                                                             |                       |                              | <b>23.724.042.348</b>                 |                |                    |                                      | <b>23.013.692.465</b>               |
|      | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>     | <b>Persentase terpenuhinya<br/>penunjang urusan<br/>pemerintahan daerah</b> | <b>KOTA<br/>BATAM</b> | <b>100 %</b>                 | <b>16.025.258.860</b>                 | <b>APBD</b>    |                    | <b>100 %</b>                         | <b>14.480.143.186</b>               |
|      | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah         | Jumlah dokumen<br>perencanaan yang disusun<br>tepat waktu                   |                       | 2 Dokumen                    | 69.393.000                            |                |                    | 2 Dokumen                            | 79.861.042                          |
|      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                           |                       | 2 Dokumen                    | 69.393.000                            |                |                    | 1 Dokumen                            | 79.861.042                          |
|      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                      | Persentase Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah yang terpenuhi      |                       | 100 Persen                   | 11.652.987.070                        |                |                    | 100 Persen                           | 12.026.165.121                      |
|      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                     |                       | 63 Orang/bulan               | 11.652.987.070                        |                |                    | 69 Orang/bulan                       | 12.026.165.121                      |
|      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                   |                                                                             |                       |                              | 94.200.000                            |                |                    |                                      | 111.494.070                         |

|  |                                                                  |                                                                                             |  |            |               |  |  |            |             |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|--|--|------------|-------------|
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                      |  | 60 Paket   | 94.200.000    |  |  | 3 Paket    | 111.494.070 |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  | 100 Persen | 310.285.000   |  |  | 100 Persen | 445.114.984 |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan          |  | 2 Paket    | 4.005.000     |  |  | 2 Paket    | 13.389.289  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                              |  | 3 Paket    | 46.000.000    |  |  | 3 Paket    | 61.436.664  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                          |  | 3 Paket    | 60.000.000    |  |  | 3 Paket    | 40.671.651  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                   |  | 2 Paket    | 45.004.000    |  |  | 2 Paket    | 24.224.954  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                |  | 1 Dokumen  | 1.800.000     |  |  | 1 Dokumen  | 2.075.930   |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |  | 12 Laporan | 153.476.000   |  |  | 36 Laporan | 303.316.496 |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana |  | 1 Unit     | 1.370.200.797 |  |  | 1 Unit     | 891.946.795 |

|  |                                                                                                                     |                                                                                                        |  |            |               |  |  |            |             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|--|--|------------|-------------|
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |  | 1 Unit     | 453.255.000   |  |  | 1 Unit     | 557.470.351 |
|  | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Unit Mebeleur yang Disediakan                                                                   |  | 44 Unit    | 164.087.000   |  |  | 3 Unit     | 23.712.891  |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |  | 44 Unit    | 138.090.000   |  |  | 10 Unit    | 95.440.899  |
|  | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                                        | Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan         |  | 3 Unit     | 614.768.797   |  |  | 1 Unit     | 215.322.654 |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        |  | 100 Persen | 385.220.400   |  |  | 100 Persen | 450.045.101 |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |  | 12 Laporan | 385.220.400   |  |  | 12 Laporan | 450.045.101 |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana       |  | 100 Persen | 2.142.972.593 |  |  | 100 Persen | 475.516.073 |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |  | 1 Unit     | 44.240.000    |  |  | 2 Unit     | 93.370.735  |

|  |                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                   |                   |                      |             |  |                   |                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--|-------------------|----------------------|
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                          |                   | 5 Unit            | 201.839.000          |             |  | 10 Unit           | 184.299.946          |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                              |                   | 55 Unit           | 128.500.000          |             |  | 50 Unit           | 87.708.059           |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  |                   | 3 Unit            | 1.768.393.593        |             |  | 3 Unit            | 110.137.333          |
|  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                                              | <b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif</b>                                                                | <b>KOTA BATAM</b> | <b>100 %</b>      | <b>2.088.134.000</b> | <b>APBD</b> |  | <b>100 %</b>      | <b>2.357.201.715</b> |
|  | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                                   | <b>Persentase PSKS yang difasilitasi</b>                                                                                        |                   | <b>100 Persen</b> | <b>2.088.134.000</b> |             |  | <b>100 Persen</b> | <b>2.357.201.715</b> |
|  | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                 |                   | 98 Orang          | 1.500.000.000        |             |  | 98 Orang          | 1.536.668.693        |
|  | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota |                   | 12 Orang          | 173.410.000          |             |  | 12 Orang          | 173.410.000          |

|  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                              |                      |             |  |                                              |                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------|--|----------------------------------------------|----------------------|
|  | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                 |                   | 10 Lembaga                                   | 300.000.000          |             |  | 10 Lembaga                                   | 550.747.285          |
|  | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)                                                   | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                              |                   | 36 Sertifikat                                | 114.724.000          |             |  | 36 Sertifikat                                | 96.375.737           |
|  | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                                                                        | <b>1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;<br/>2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi</b>                                                                                                   | <b>KOTA BATAM</b> | <b>1. 90.18% 2. 90.18 %</b>                  | <b>3.035.342.488</b> | <b>APBD</b> |  | <b>1. 90.18% 2. 90.18 %</b>                  | <b>2.058.458.760</b> |
|  | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> | <b>1. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi;<br/>2. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi;<br/>3. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi<br/>4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi</b> |                   | <b>75 %<br/>85,7 %<br/>10,9 %<br/>92,6 %</b> | <b>3.035.342.488</b> |             |  | <b>75 %<br/>85,7 %<br/>10,9 %<br/>92,6 %</b> | <b>2.058.458.760</b> |

|  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |  |           |               |  |  |           |             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|--|--|-----------|-------------|
|  | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    |  | 360 Orang | 352.665.000   |  |  | 350 Orang | 358.726.982 |
|  | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    |  | 60 Orang  | 91.100.000    |  |  | 10 Orang  | 122.643.477 |
|  | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       |  | 40 Orang  | 539.148.480   |  |  | 100 Orang | 204.597.644 |
|  | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 550 Orang | 644.287.008   |  |  | 700 Orang | 815.054.431 |
|  | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                |  | 15 Orang  | 74.867.000    |  |  | 35 Orang  | 152.115.529 |
|  | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                     | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                           |  | 80 Orang  | 1.333.275.000 |  |  | 89 Orang  | 405.320.697 |

|  |                                                                                  |                                                                                                                                        |                       |                   |                      |             |  |                   |                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|--|-------------------|----------------------|
|  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN<br/>DAN JAMINAN SOSIAL</b>                               | <b>Persentase DTKS yang<br/>memperoleh perlindungan<br/>dan jaminan sosial (PKH,<br/>BPNT)</b>                                         | <b>KOTA<br/>BATAM</b> | <b>79.01 %</b>    | <b>1.118.000.000</b> | <b>APBD</b> |  | <b>79.01 %</b>    | <b>2.356.344.977</b> |
|  | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin<br/>Cakupan Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>       | <b>Persentase DTKS yang<br/>divalidasi dan Jumlah<br/>mahasiswa yang di bantu</b>                                                      |                       | <b>100 Persen</b> | <b>1.118.000.000</b> |             |  | <b>100 Persen</b> | <b>2.356.344.977</b> |
|  | Pendataan Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota                       | Jumlah Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Didata                                                                 |                       | 31320 Orang       | 927.000.000          |             |  | 60108 Orang       | 2.331.918.133        |
|  | Fasilitasi Bantuan Sosial<br>Kesejahteraan Keluarga                              | Jumlah Keluarga Penerima<br>Manfaat (KPM) yang<br>Mendapatkan Bantuan<br>Sosial Kesejahteraan<br>Keluarga Kewenangan<br>Kabupaten/Kota |                       | 20 Keluarga       | 191.000.000          |             |  | 10 Orang          | 24.426.844           |
|  | <b>PROGRAM PENANGANAN<br/>BENCANA</b>                                            | <b>Persentase korban<br/>bencana yang ditangani<br/>pada saat dan setelah<br/>tanggap darurat bencana</b>                              | <b>KOTA<br/>BATAM</b> | <b>100 %</b>      | <b>439.854.000</b>   | <b>APBD</b> |  | <b>100 %</b>      | <b>413.818.963</b>   |
|  | <b>Perlindungan Sosial Korban<br/>Bencana Alam dan Sosial<br/>Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase korban<br/>bencana dari kelompok<br/>rentan yang dilindungi dan<br/>diberikan penjaminan<br/>sosial</b>                  |                       | <b>100 Persen</b> | <b>439.854.000</b>   |             |  | <b>100 Persen</b> | <b>413.818.963</b>   |
|  | Penyediaan Makanan                                                               | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Permakanan<br>3x1 Hari dalam Masa<br>Tanggap Darurat<br>(Pengungsian) Kewenangan<br>Kabupaten/Kota    |                       | 500 Orang         | 439.854.000          |             |  | 1200 Orang        | 413.818.963          |

|  |                                                                                |                                                                                      |                   |                     |                       |             |  |                     |                       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------|
|  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                                | <b>Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana</b>                    | <b>KOTA BATAM</b> | <b>89.66 %</b>      | <b>230.498.000</b>    | <b>APBD</b> |  | <b>89.66 %</b>      | <b>290.293.295</b>    |
|  | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>               | <b>Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara</b>               |                   | <b>89.66 Persen</b> | <b>230.498.000</b>    |             |  | <b>89.66 Persen</b> | <b>290.293.295</b>    |
|  | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                      | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota |                   | 45 Makam            | 157.516.000           |             |  | 21 Makam            | 208.363.243           |
|  | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                        | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota         |                   | 12 Laporan          | 72.982.000            |             |  | 12 Laporan          | 81.930.052            |
|  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |                                                                                      |                   |                     | <b>21.981.833.000</b> |             |  |                     | <b>19.732.068.506</b> |
|  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>             |                                                                                      |                   |                     | <b>21.981.833.000</b> |             |  |                     | <b>19.732.068.506</b> |
|  | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                  | <b>Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya</b>                 | <b>KOTA BATAM</b> | <b>93.75 %</b>      | <b>140.000.000</b>    | <b>APBD</b> |  | <b>93.75 %</b>      | <b>241.019.693</b>    |
|  | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b> | <b>Jumlah kelurahan yang berprestasi</b>                                             |                   | <b>12 Kelurahan</b> | <b>140.000.000</b>    |             |  | <b>12 Kelurahan</b> | <b>241.019.693</b>    |
|  | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan           | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan       |                   | 3 Dokumen           | 140.000.000           |             |  | 3 Dokumen           | 241.019.693           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                       |             |  |                   |                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--|-------------------|-----------------------|
|  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>                                                                                                                                                              | <b>Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif</b>                                                                                                                                                          | <b>KOTA BATAM</b> | <b>98.44 %</b>    | <b>21.841.833.000</b> | <b>APBD</b> |  | <b>98.44 %</b>    | <b>19.491.048.813</b> |
|  | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi</b>                                                                                                                                                             |                   | <b>100 Persen</b> | <b>21.841.833.000</b> |             |  | <b>100 Persen</b> | <b>19.491.048.813</b> |
|  | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |                   |                   |                       |             |  | 3 Dokumen         | 334.482.210           |
|  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                     |                   | 711 Lembaga       | 20.978.923.000        |             |  | 686 Lembaga       | 17.849.671.415        |

|  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                   |           |                    |             |  |            |                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------|--|------------|----------------------|
|  | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |                   |           |                    |             |  | 540 Unit   | 334.482.210          |
|  | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                               |                   | 3 Laporan | 294.507.500        |             |  | 3 Laporan  | 212.023.420          |
|  | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                |                   | 2 Laporan | 568.402.500        |             |  | 12 Laporan | 222.988.140          |
|  | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                   |                   |           |                    |             |  | 1 Dokumen  | 537.401.418          |
|  | <b>UPTD P2PMKS NILAM SURI</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                   |           | <b>786.955.000</b> |             |  |            | <b>1.057.431.569</b> |
|  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                   |           | <b>786.955.000</b> |             |  |            | <b>1.057.431.569</b> |
|  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                   |           | <b>786.955.000</b> |             |  |            | <b>1.057.431.569</b> |
|  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                                  | <b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                                                                                                  | <b>KOTA BATAM</b> |           | <b>150.000.000</b> | <b>APBD</b> |  |            | <b>190.674.206</b>   |

|  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |  |           |                    |             |  |           |                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------------|-------------|--|-----------|--------------------|
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                       | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>                                                    |  |           | <b>150.000.000</b> |             |  |           | <b>190.674.206</b> |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             |  | 1 Unit    | 150.000.000        |             |  | 1 Unit    | 190.674.206        |
|  | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                                                                 | <b>1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;<br/>2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi</b> |  |           | <b>636.955.000</b> | <b>APBD</b> |  |           | <b>866.757.363</b> |
|  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase tuna sosial yang direhabilitasi                                                                                                                 |  |           | 636.955.000        |             |  |           | 866.757.363        |
|  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                           | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     |  | 550 Orang | 636.955.000        |             |  | 500 Orang | 866.757.363        |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2025 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun menjaring aspirasi masyarakat.

Monitoring dan evaluasi juga harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan agar diperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut :

**TABEL IV.1**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

| KODE | URUSAN/BID.URUSAN PEMDA DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN        | INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN             | RENCANA TAHUN 2025 |                        |                                 |             | CATATAN PENTING |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
|      |                                                                  |                                                              | LOKASI             | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA |                 |
| 1    | 2                                                                | 3                                                            | 4                  | 5                      | 6                               | 7           | 8               |
|      | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                         |                                                              |                    |                        | 45.705.875.348                  |             |                 |
|      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                                                              |                    |                        | 23.724.042.348                  |             |                 |
| 1    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah | KOTA BATAM         | 100 %                  | 16.025.258.860                  | APBD        |                 |
|      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu          |                    | 2 Dokumen              | 69.393.000                      |             |                 |

|  |                                                                  |                                                                                    |  |                |                |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        |  | 2 Dokumen      | 69.393.000     |  |  |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi                   |  | 100 Persen     | 11.652.987.070 |  |  |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |  | 63 Orang/bulan | 11.652.987.070 |  |  |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                                                                    |  |                | 94.200.000     |  |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             |  | 60 Paket       | 94.200.000     |  |  |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                           |  | 100 Persen     | 310.285.000    |  |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  | 2 Paket        | 4.005.000      |  |  |

|  |                                                                  |                                                                                             |  |            |               |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|--|--|
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                              |  | 3 Paket    | 46.000.000    |  |  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                          |  | 3 Paket    | 60.000.000    |  |  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                   |  | 2 Paket    | 45.004.000    |  |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                |  | 1 Dokumen  | 1.800.000     |  |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |  | 12 Laporan | 153.476.000   |  |  |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana |  | 1 Unit     | 1.370.200.797 |  |  |

|  |                                                                              |                                                                                                |  |            |             |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|--|--|
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          |  | 1 Unit     | 453.255.000 |  |  |
|  | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Unit Mebeleur yang Disediakan                                                           |  | 44 Unit    | 164.087.000 |  |  |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |  | 44 Unit    | 138.090.000 |  |  |
|  | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan |  | 3 Unit     | 614.768.797 |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |  | 100 Persen | 385.220.400 |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |  | 12 Laporan | 385.220.400 |  |  |

|  |                                                                                                                              |                                                                                                              |  |            |               |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|--|--|
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     | Persentase Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah yang terlaksana       |  | 100 Persen | 2.142.972.593 |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |  | 1 Unit     | 44.240.000    |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  | 5 Unit     | 201.839.000   |  |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                        |  | 55 Unit    | 128.500.000   |  |  |

|   |                                                                                    |                                                                                                 |                   |                   |                      |             |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--|
|   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                   | 3 Unit            | 1.768.393.593        |             |  |
| 2 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                 | <b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif</b>                                | <b>KOTA BATAM</b> | <b>100 %</b>      | <b>2.088.134.000</b> | <b>APBD</b> |  |
|   | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>Persentase PSKS yang difasilitasi</b>                                                        |                   | <b>100 Persen</b> | <b>2.088.134.000</b> |             |  |
|   | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |                   | 98 Orang          | 1.500.000.000        |             |  |

|  |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |  |               |             |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|--|--|
|  | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                 |  | 12 Orang      | 173.410.000 |  |  |
|  | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    |  | 10 Lembaga    | 300.000.000 |  |  |
|  | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)    | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 36 Sertifikat | 114.724.000 |  |  |

|   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                    |               |      |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------|------|--|
| 3 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        | 1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;<br>2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi                                                                                                 | KOTA BATAM | 1. 90.18%<br>2. 90.18 %            | 3.035.342.488 | APBD |  |
|   | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi;<br>2. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi;<br>3. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi<br>4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi |            | 75 %<br>85,7 %<br>10,9 %<br>92,6 % | 3.035.342.488 |      |  |

|  |                                          |                                                                                                                           |  |           |             |  |  |
|--|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|--|--|
|  | Penyediaan Permakanan                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 360 Orang | 352.665.000 |  |  |
|  | Penyediaan Alat Bantu                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                 |  | 60 Orang  | 91.100.000  |  |  |
|  | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                    |  | 40 Orang  | 539.148.480 |  |  |

|  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |  |           |               |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|--|--|
|  | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 550 Orang | 644.287.008   |  |  |
|  | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                |  | 15 Orang  | 74.867.000    |  |  |
|  | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                     | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                           |  | 80 Orang  | 1.333.275.000 |  |  |

|   |                                                                    |                                                                                                                         |                   |                   |                      |             |  |
|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--|
| 4 | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                     | <b>Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)</b>                                      | <b>KOTA BATAM</b> | <b>79.01 %</b>    | <b>1.118.000.000</b> | <b>APBD</b> |  |
|   | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu</b>                                               |                   | <b>100 Persen</b> | <b>1.118.000.000</b> |             |  |
|   | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota               | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                           |                   | 31320 Orang       | 927.000.000          |             |  |
|   | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                   | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |                   | 20 Keluarga       | 191.000.000          |             |  |
| 5 | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>                                  | <b>Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</b>                           | <b>KOTA BATAM</b> | <b>100 %</b>      | <b>439.854.000</b>   | <b>APBD</b> |  |

|   |                                                                          |                                                                                                                      |                   |                     |                    |             |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|   | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial</b>                |                   | <b>100 Persen</b>   | <b>439.854.000</b> |             |  |
|   | Penyediaan Makanan                                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota |                   | 500 Orang           | 439.854.000        |             |  |
| 6 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                          | <b>Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana</b>                                                    | <b>KOTA BATAM</b> | <b>89.66 %</b>      | <b>230.498.000</b> | <b>APBD</b> |  |
|   | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>         | <b>Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara</b>                                               |                   | <b>89.66 Persen</b> | <b>230.498.000</b> |             |  |

|   |                                                                              |                                                                                     |                   |                |                       |             |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------|--|
|   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                    | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota |                   | 45 Makam       | 157.516.000           |             |  |
|   | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                      | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota        |                   | 12 Laporan     | 72.982.000            |             |  |
|   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |                                                                                     |                   |                | <b>21.981.833.000</b> |             |  |
|   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>           |                                                                                     |                   |                | <b>21.981.833.000</b> |             |  |
| 7 | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                | <b>Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya</b>                | <b>KOTA BATAM</b> | <b>93.75 %</b> | <b>140.000.000</b>    | <b>APBD</b> |  |

|   |                                                                                            |                                                                                |                   |                     |                       |             |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--|
|   | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>             | <b>Jumlah kelurahan yang berprestasi</b>                                       |                   | <b>12 Kelurahan</b> | <b>140.000.000</b>    |             |  |
|   | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                       | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan |                   | 3 Dokumen           | 140.000.000           |             |  |
| 8 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b> | <b>Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif</b>                  | <b>KOTA BATAM</b> | <b>98.44 %</b>      | <b>21.841.833.000</b> | <b>APBD</b> |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |  |                   |                       |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--|--|
|  | <b>Pemberdayaan Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang Bergerak di<br/>Bidang Pemberdayaan Desa dan<br/>Lembaga Adat Tingkat Daerah<br/>Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan<br/>Masyarakat Hukum Adat yang<br/>Masyarakat Pelakunya Hukum Adat<br/>yang Sama dalam Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Lembaga kemasyarakatan<br/>yang difasilitasi</b> |  | <b>100 Persen</b> | <b>21.841.833.000</b> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |                |                |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|
|  | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |  |                |                |  |  |
|  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                     |  | 711<br>Lembaga | 20.978.923.000 |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |  |           |             |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|--|--|
|  | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |  |           |             |  |  |
|  | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                               |  | 3 Laporan | 294.507.500 |  |  |
|  | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                |  | 2 Laporan | 568.402.500 |  |  |

|   |                                                                                                               |                                                                                                                                    |                   |  |                    |             |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--------------------|-------------|--|
|   | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |                   |  |                    |             |  |
|   | <b>UPTD P2PMKS NILAM SURI</b>                                                                                 |                                                                                                                                    |                   |  | <b>786.955.000</b> |             |  |
|   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                        |                                                                                                                                    |                   |  | <b>786.955.000</b> |             |  |
|   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                                                                      |                                                                                                                                    |                   |  | <b>786.955.000</b> |             |  |
| 9 | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                            | <b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                                                | <b>KOTA BATAM</b> |  | <b>150.000.000</b> | <b>APBD</b> |  |

|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                    |  |        |                    |             |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------------|-------------|--|
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b>     | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik<br/>Daerah Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>                                                    |  |        | <b>150.000.000</b> |             |  |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                               |  | 1 Unit | 150.000.000        |             |  |
| 10 | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                       | <b>1. Persentase anak terlantar dan lansia<br/>terlantar yang direhabilitasi;<br/>2. Persentase penyandang disabilitas<br/>dan tuna sosial yang direhabilitasi</b> |  |        | <b>636.955.000</b> | <b>APBD</b> |  |

|  |                                                                                                                                                    |                                                                                        |  |           |             |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|--|--|
|  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase tuna sosial yang direhabilitasi                                             |  |           | 636.955.000 |  |  |
|  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                           | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 550 Orang | 636.955.000 |  |  |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA**

Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Batam. Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2025 ini sudah mengacu pada RPJMD dan Renstra periode Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan Dokumen Anggaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Jika dalam proses perkembangan pelaksanaannya program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2025.

## **5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN**

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun 2021-2026, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah -kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut ;

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2025 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/ mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya RPJMD, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota Batam, RKPD Kota Batam dan Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam;
2. Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun bersumber dari APBD

## **5.3. RENCANA TINDAK LANJUT**

Program dan kegiatan pada Renja 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku;
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring.
4. Dalam menjamin konsistensi sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam secara berjenjang, bertanggungjawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja 2025.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI